

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Bakri, Muhammad. 2007, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara, Paradigma Baru untuk Reformasi Agraris*, Citra Media: Yogyakarta.
- Chomzah, Ali Achmad. 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan: Jakarta.
- . 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan: Jakarta.
- Lubis, Rustam Effendi dan Agus Widanarko, 2011, *Buku Pintar Kelapa Sawit*, PT. Agro Media Pustaka: Jakarta.
- Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2008, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Raharjo, Satjipto. 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso. Urip. 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana: Jakarta.
- Sitorus, Oloan dan HM Zaki Sierrad. 2006, *Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan Implementasi*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia: Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.

------. 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo 1994, *Metode Penelitian dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zed, Mestika. 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62).

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36).

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 37).

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 14).

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.

Keputusan Bersana Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK/050/70/90 dan No: 23-VII-1990 tentang ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

### **Artikel, Buletin, Penelitian, Makalah, Skripsi, Disertasi, Tesis, dan Jurnal**

Affandi, Rifai, Ilyas Ismail, Suhaimi, “Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. Ubertraco/Nafasindo dengan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Singkil)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 2, No.2.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang,, *Kecamatan Tenggulun dalam Angka 2016*.

-----, Statistik Daerah Kecamatan Tenggulun 2016.

Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, Studi Pendahuluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019.

Safitri, Myrna. 2014, *Satu Administrasi pertanahan: Peluang dan Kendala dalam Peraturan Bersama Menteri untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan*, Epistema Institute, Volume 04.

Santoso, Urip. 2011, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Bidang Pertanahan*, Jurnal Hukum, Volume. 3, No. 2.

Siburian, Robert. ”Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume. 8, No. 1, 2006.

Syahyuti, Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 24, No. 1, 2006.

Djufri, “Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh sebagai Laboratorium Alam yang Menyimpan Kekayaan Biodiversitas untuk Diteliti dalam Rangka Pencarian Bahan Baku Obat-obatan”, *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*, Volume. 1, No. 7, 2015.

## Internet

Anonim, *7.799 KK Korban Banjir Aceh Tamiang Masih Bertahan di Tenda*, <http://www.antaranews.com/berita/53860/7799-kk-korban-banjir-aceh-tamiang-masih-bertahan-di-tenda>.

Anonim, *Hutan Aceh Tamiang di Ambang Kehancuran*, <http://harianandalas.com/kanal-aceh/hutan-aceh-tamiang-di-ambang-kehancuran>.

Anonim, *Kenaikan Harga TBS Dipicu Penguatan Harga Minyak Sawit*, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/02/24/kenaikan-harga-tbs-dipicu-penguatan-harga-minyak-sawit>.

Azhar, *Ikhtisar Leuser*, [http://www.kompasiana.com/azhar/ikhtisar-leuser\\_5530008b6ea834e8038b457f](http://www.kompasiana.com/azhar/ikhtisar-leuser_5530008b6ea834e8038b457f).

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, *Para Duta Besar Eropa Mengunjungi Medan untuk Mempromosikan Eropa dan Meningkatkan Kerjasama*, [https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/12434/para-duta-besar-eropa-mengunjungi-medan-untuk-mempromosikan-eropa-dan-meningkatkan-kerjasama\\_id](https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/12434/para-duta-besar-eropa-mengunjungi-medan-untuk-mempromosikan-eropa-dan-meningkatkan-kerjasama_id).

Hanafiah, Junaidi, *Berakhirnya Sawit Illegal di Aceh Tamiang*, <http://www.mongabay.co.id/2015/12/17/berakhirnya-sawit-ilegal-di-aceh-tamiang/>.

Kementerian perindustrian, *Gambaran Sekilas Perindustrian Minyak Kelapa Sawit*, <http://www.kemenperin.go.id/download/289/Paket-Informasi-Komoditi-Minyak-Kelapa-Sawit>.

Setapak, *Restorasi Hutan Aceh*, <http://programsetapak.org/setapak-publication/restorasi-hutan-aceh/>.

United States Department of Agriculture, *Palm Oil*, <http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=exports>.

Usandi, Mustafa Kamal. *Warga Aceh Gugat Mendagri Terancam Gagal Karena Gubernur Bersikukuh.*

[https://www.goaceh.co/berita/baca/2016/03/31/warga-aceh-gugat-mendagri-terancam-gagal-karena-gubernur-bersikukuh.](https://www.goaceh.co/berita/baca/2016/03/31/warga-aceh-gugat-mendagri-terancam-gagal-karena-gubernur-bersikukuh)